



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 2 Maret 2026/Periodik - 2025)

Status Verifikasi Administratif Lengkap

BIDANG : EKSEKUTIF

LEMBAGA : KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS, DAN TEKNOLOGI

UNIT KERJA : INSTITUT TEKNOLOGI SEPULUH NOPEMBER

I. DATA PRIBADI

1. Nama : **AGUS MUHAMAD HATTA**
2. Jabatan : **WAKIL REKTOR BIDANG RISET, INOVASI, KERJASAMA, DAN KEALUMNIAN**
3. NHK : **693114**

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN **Rp.** **3.715.000.000**

1. Tanah dan Bangunan Seluas 105 m2/90 m2 di KAB / KOTA KOTA SURABAYA , HASIL SENDIRI Rp. 1.400.000.000
2. Tanah dan Bangunan Seluas 104 m2/70 m2 di KAB / KOTA JEMBER, HASIL SENDIRI Rp. 665.000.000
3. Tanah dan Bangunan Seluas 112 m2/68 m2 di KAB / KOTA PASURUAN, HASIL SENDIRI Rp. 1.650.000.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN **Rp.** **454.000.000**

1. MOTOR, HONDA BEAT SEPEDA MOTOR Tahun 2017, HASIL SENDIRI Rp. 12.000.000
2. MOBIL, HONDA CITY HB 1.5L RS MT Tahun 2022, HASIL SENDIRI Rp. 220.000.000
3. MOBIL, DAIHATSU ROCKY 1.0 R CVT Tahun 2022, HASIL SENDIRI Rp. 189.000.000
4. MOTOR, KAWASAKI W175 Tahun 2024, HASIL SENDIRI Rp. 33.000.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA **Rp.** **127.000.000**

D. SURAT BERHARGA **Rp.** **----**

E. KAS DAN SETARA KAS **Rp.** **96.000.000**

F. HARTA LAINNYA **Rp.** **----**

Sub Total **Rp.** **4.392.000.000**



III. HUTANG

Rp. 964.218.000

IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)

Rp. 3.427.782.000

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.